



# Masih Ada 47 Hektare Kawasan Kumuh

## ■ Pemkot Yogya Target Penataan Rampung 2029

**YOGYA, TRIBUN** - Puluhan hektar kawasan kumuh masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Memasuki Tahun Anggaran 2026, optimalisasi penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan melalui berbagai skema pendanaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUP-KP) Kota Yogyakarta, Umi Ahsani, berjanji saat ini luas kawasan kumuh masih berada di angka 47 hektare. Dari jumlah tersebut, sebagian besar memang berada di wilayah bantaran sungai, yang tersebar di berbagai titik di Kota Yogyakarta.

"Penanganan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta dilakukan setiap tahun melalui APBD. Selain itu, kami juga sedang mengusulkan penanganan melalui APBN, seiring dengan pengeseran kewenangan penanganan kumuh yang kini berada di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujarnya, Selasa (13/1).

Guna mencegah munculnya titik kumuh baru, Pemkot Yogyakarta mengusulkan bantuan peningkatan kualitas RTLH ke Kementerian PKP melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Umi mengungkapkan, sampai sejauh ini, pihaknya telah mengajukan sedikitnya 260 unit rumah secara *by name by address*. "Jika seluruh usulan lolos verifikasi, masing-masing rumah akan menerima bantuan sebesar Rp20 juta. Namun, karena bersifat swadaya, masyarakat tetap perlu berpartisipasi da-

### SELESAIKAN PR

- Puluhan hektar kawasan kumuh masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.
- Memasuki Tahun Anggaran 2026, optimalisasi penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan melalui berbagai skema pendanaan.
- Luasan kawasan kumuh masih berada di angka 47 hektare.
- Dari jumlah tersebut, sebagian besar memang berada di wilayah bantaran sungai, yang tersebar di berbagai titik di Kota Yogyakarta.

lam pembiayaan," jelasnya.

Kendati demikian, ia menekankan, bahwa persyaratan administrasi BSPS cukup ketat, terutama soal legalitas tanah yang ditempati oleh warga. Rumah di lahan tanpa status hukum yang jelas, berada di sempadan sungai, atau tanpa dokumen resmi, tidak bisa mendapatkan bantuan ini. "Pemkot menargetkan penurunan kawasan kumuh secara bertahap, sekaligus peningkatan kualitas hunian masyarakat. Targetnya kurang lebih di tahun 2029 dengan proyeksi setiap tahunnya berkurang 12 persen," tegasnya.

**Alokasi anggaran**  
Sementara, Ketua Tim Kerja Penataan Perumahan dan Permukiman DPUP-KP Kota Yogyakarta, Yunita Rahmi

Hapsari, menuturkan, anggaran Rp4,25 miliar telah dialokasikan dalam APBD 2026 untuk program Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Beberapa wilayah yang menjadi sasaran di antaranya Kelurahan Wirobrajan, Pandeyan, Escrio, Sorosutan, Gedongkiwo, hingga Karangwaru. "Penanganan difokuskan pada penyediaan sarana prasarana, seperti pembangunan jalan lingkungan di lokasi rumah yang sudah dimundurkan dari tepi sungai, namun belum memiliki akses jalan," ungkapnya.

Selain itu, terdapat pula anggaran Rp8,66 miliar untuk peningkatan kualitas RTLH yang mencakup skema konsolidasi lahan di Kotabaru (tahap II), Pringgokusuman (tahap IV), serta Terban RW 5.

"Pada RTLH APBD murni, sebanyak 53 unit rumah akan ditangani pada triwulan I hingga III Tahun 2026. Jumlah itu direncanakan bertambah sedikit 10 unit melalui perubahan anggaran," terangnya.

Tidak hanya mengandalkan APBD dan APBN, penataan hunian untuk pengentasan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta juga mendapat suntikan dari Dana Keistimewaan (Danais). Sebagai contoh, tahun ini, sebanyak 25 unit rumah baru akan dibangun di Kelurahan Givangan, Purabaya, Sorosutan, dan Prenggan.

Menariknya, bantuan senilai Rp65 juta per unit tersebut, mewajibkan bangunan mengikuti ketentuan langgam arsitektur khas Yogyakarta. Di sisi lain, bantuan bedah rumah juga dioptimalkan melalui Jaur CSR untuk menanganai perbaikan yang bersifat mendesak seperti atap rumah. (ata)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005